

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XXII
MARET 2018

KEJAHATAN CYBER

KIAN MERAJALELA

SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Menjadi sebuah bangsa yang besar memang tidaklah mudah, banyak sudah orang yang berkata bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Entah apa ukurannya ketika banyak kalangan mengatakan itu. Apakah karena luas wilayahnya, jumlah penduduknya, luas lautnya, kekayaan suku bangsa di dalamnya atau kekayaan alam serta adat istiadatnya. Yang jelas ketika kita mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang besar, maka sesungguhnya seperti juga sebuah teori fisika, semakin besar dan berat sebuah benda, dayanya juga akan semakin besar atau kalau boleh dibilang, seiring kekuatan adanya besar, maka akan datang tanggung jawab yang besar pula.

Ada beberapa hal yang harus dipanggil oleh orang-orang yang siap menjadi pemimpin di negara ini. Salah satunya adalah kesiapan berkorban dan menyerahkan seluruh tenaga dan pikirannya dalam memimpin bangsa Indonesia tanpa pernah berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Sesungguhnya sebuah kata-kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan.

Pada edisi kali ini Majalah Catra kembali hadir menyajikan berita-berita yang lebih mendahulukan sisi optimisme dan nilai positif dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Setjen Wantannas sekaligus menumbuhkan keyakinan akan nilai positif terus yang dihembuskan di negara tercinta ini, suatu saat akan berbuah pengaruh yang membawa dampak yang positif pula.

REDAKSI



INDONESIA
CAN CHANGE
THE WORLD

WHEN EACH OF YOU
BELIEVE YOU CAN

Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15
Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683
email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 PERLUKAH PERBAIKAN BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI?



- 7 HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

TAJUK UTAMA



- 9 KEJAHATAN CYBER KIAN MERAJALELA
Simalakama Dampak Kemajuan Teknologi Digital

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 14 KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

INFO KITA



- 16 UPAYA MENEMBUS PAYUNG HUKUM BELA NEGARA



- 18 PELAJARI MASALAH DI DAERAH MELALUI KAJIDA



- 18 INILAH FAKTA-FAKTA TENTANG STEPHEN HAWKING



- 20 TRANSFER EGY MAULANA VIKRI DAN POTENSI SEPAKBOLA INDONESIA

Inspirasi Bulan Ini

KENTANG, TELUR, DAN BIJI KOPI

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan, kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan.

Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi tiga panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah tiga panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga.

Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan.

Setelah dua puluh menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?"

"Kentang, telur, dan kopi," putrinya buru-buru menjawabnya.

"Lihatlah lebih dekat, dan sentuh kentang ini", kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum.

"Ayah, apa artinya semua ini?" Tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih.

Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda, Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru.

"Kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya.

Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?"

PERLUKAH PERBAIKAN BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI..?

Oleh: Hulman Napitupulu

Korupsi adalah kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), dan merupakan kejahatan yang menjadi musuh besar bagi seluruh bangsa di dunia. Korupsi berdampak luas dan sangat merugikan bagi masyarakat dan Negara. Terjadinya korupsi akan menimbulkan:

1. Kelesuan serta rendahnya pertumbuhan ekonomi;
2. Rusak dan buruknya pelayanan publik serta tingginya harga barang/jasa sehingga pengentasan kemiskinan akan berjalan lambat dan meningkatnya angka kriminalitas;
3. Munculnya kepemimpinan yang bersifat korup sehingga kepercayaan publik pada sistem demokrasi dan pemerintahan serta lembaga negara akan hilang;
4. Birokrasi tidak efisien;
5. Peraturan perundang-undangan dan etika sosial politik tidak efektif;
6. Terjadinya kerawanan pertahanan keamanan nasional karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, rendahnya kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, menguatnya kekerasan dan konflik dalam masyarakat; dan
7. Menurunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup.

Bentuk sanksi pidana bagi pelaku korupsi yang diatur hingga saat ini adalah pidana mati, pidana penjara, dan/atau pidana denda serta pidana tambahan yang bersifat khusus. Sanksi tersebut tertuang di dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang diikuti dengan kriteria serta angka ancamannya masing-masing.

Bentuk sanksi-sanksi tersebut oleh para Hakim telah diterapkan secara variatif melalui putusannya terhadap para pelaku korupsi, namun hingga saat ini dapat dikatakan bahwa saksi-sanksi tersebut belum memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau belum mampu sebagai sarana pencegahan terjadinya kasus korupsi.

Menurut *literature* hukum, tujuan pemidanaan bermakna untuk menjustifikasi atau mencari pembenaran mengapa pelaku tindak pidana dikenai (sanksi) pidana serta dampak sanksi pidana yang dikenakan tersebut bagi pelaku tindak pidana dan bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut para ahli terbagi menjadi tiga yaitu:

- Teori atributif (absolut);
- teori teleologis; dan
- teori atributif-teleologis.

Menurut teori atributif, pemidanaan bertujuan untuk membalas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku agar timbul perasaan keadilan bagi pihak yang menuntut adanya keadilan (perasaan telah terbalaskan).

Teori teleologis memandang bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan merupakan sarana untuk mencapai kemanfaatan, melindungi masyarakat dengan menjauhkan dari pelaku, mencegah dan membina pelaku, memperbaikinya agar tidak (lagi) mengulangi perbuatannya sehingga kemudian akan tercipta ketertiban dan masyarakat yang sejahtera.

Teori ketiga yaitu atributif-teleologis yang



merupakan gabungan atau integrasi dari kedua teori di atas berpandangan bahwa pemidanaan bertujuan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku dan sekaligus melindungi masyarakat serta membina pelaku.

Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001), tidak menyebutkan secara tegas teori pemidanaan mana yang dianut atau dipedomani. Penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, akan menghapuskan kesempatan dilakukannya pembinaan terhadap yang bersangkutan atau memberikan kesempatan kedua karena dengan dijatuhi pidana mati maka kehidupannya akan diakhiri.

Itulah sebabnya pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi diterapkan jika korupsi dilakukan pada "keadaan tertentu" yaitu pada saat negara dalam keadaan bahaya, terjadinya bencana alam nasional atau saat negara dalam keadaan krisis moneter serta jika merupakan pengulangan tindak pidana korupsi (*recidive*). Jika pidana mati ini yang diterapkan terhadap pelaku korupsi, maka fungsi pencegahannya hanya berlaku kepada pihak selain terpidana (masyarakat) dengan menimbulkan rasa takut (*deterrent effect*).

Penerapan pidana penjara terhadap pelaku korupsi dilakukan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pidana penjara adalah

suatu pidana berupa pembatasan kebebasan ruang gerak dengan memasukkan pelaku ke dalam ruang tertutup selama waktu tertentu yang lamanya ditentukan dalam putusan hakim. Di dalam Lapas tersebut pelaku diwajibkan mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku dan sekaligus dilakukan pembinaan yang sesuai dengan latar belakang pelaku korupsi mengingat pelaku korupsi umumnya adalah kalangan terpelajar dan telah memiliki berbagai ketrampilan.

Dalam hal ini, fungsi pencegahan berlaku bagi pelaku korupsi melalui proses pembinaan yang dilakukan oleh Lapas agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga mencegah pihak lain (masyarakat) untuk takut melakukannya jika pidana penjara yang diterapkan dipandang cukup menimbulkan rasa takut atau malu.

Sementara penerapan pidana denda, jika dijatuhkan sebagai pidana pokok dalam tindak pidana umum, lazimnya diterapkan pada tindak pidana yang lebih ringan dan hanya berupa pelanggaran/bukan kejahatan. Adapun dalam tindak pidana umum, sanksi yang dapat diterapkan hanya satu saja pidana pokok yaitu pidana mati, penjara atau denda. Namun untuk tindak pidana korupsi, pelaku dapat dijatuhi lebih dari satu pidana pokok. Jadi pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana penjara sekaligus juga pidana denda yang jumlahnya juga sudah ditentukan dalam putusan



Foto: Internet

hakim. Efek pencegahan dari jenis pidana denda ini tidak terlalu signifikan untuk tindak pidana korupsi, dan para penegak hukum pun biasanya enggan untuk menjadikannya sebagai sanksi pidana yang berdiri sendiri. Selain pidana pokok tersebut, pelaku korupsi dapat dan umumnya juga dijatuhi pidana tambahan antara lain berupa :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim; dan
- d. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Saat ini sanksi pidana (penjara dan denda) yang diterapkan dan dijatuhkan dalam putusan

korupsi yaitu pelaku korupsi yang telah dijatuhi pidana penjara berkekuatan hukum tetap, pada siang hari dengan pakaian yang berwarna mencolok diwajibkan melakukan kerja sosial seperti membersihkan sampah atau gorong-gorong di tempat umum di area lingkungan dimana yang bersangkutan cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Terutama untuk para pelaku korupsi yang sebelumnya adalah pejabat tinggi dan tersohor.

Tujuannya adalah untuk memberikan rasa malu dan rasa penyesalan yang mendalam kepada pelaku korupsi tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi orang lain yang berpotensi untuk menjadi pelaku korupsi dan juga terhadap warga masyarakat umumnya agar tidak korupsi.



Foto: Internet

hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan sudah cukup tinggi dan bervariasi, namun nampaknya pidana yang dijatuhkan tersebut, belum sepenuhnya berhasil untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini tergambar dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi pada 11 Desember 2017 lalu. Ia mengatakan : *“Tetapi yang mengherankan, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada”*...(kompas.com)

Meskipun korupsi bukan semata-mata soal hukum, tetapi perlu kiranya dilakukan perbaikan terhadap bentuk sanksi pidana yang diterapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, agar lebih dapat menimbulkan **efek jera**, misalnya pemberlakuan pidana sosial terhadap pelaku

Dalam hal ini pemidanaan akan sangat efektif berfungsi sebagai pencegahan perilaku korupsi baik untuk para pelaku maupun terhadap orang lain. Hal ini juga akan mencegah atau paling tidak mengurangi kesempatan para pelaku korupsi menyuap pegawai Lapas sehingga koruptor tersebut mendapatkan fasilitas mewah di dalam penjara.

Dipekerjakannya pelaku korupsi tersebut dengan cara-cara seperti tersebut di atas untuk membersihkan lingkungan secara fisik di tempat umum, dapat pula diperoleh manfaat lain yakni bahwa para pelaku korupsi itu tidak hanya diberi makan secara gratis makan dan tidur enak dengan fasilitas yang biayanya dibebankan pada anggaran negara.****

HAK ASASI MANUSIA DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

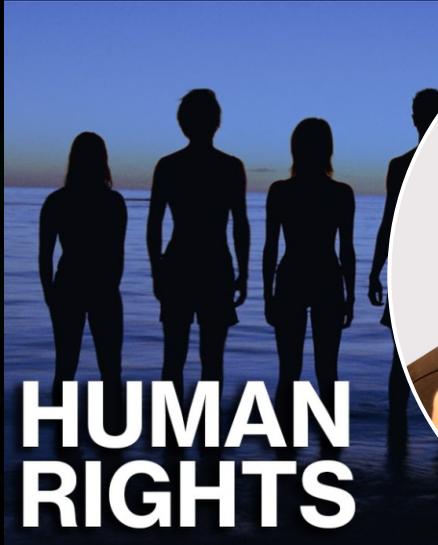
Dalam kehidupan sehari-hari, Hak Asasi Manusia (HAM) sering menjadi buah bibir atau obrolan mulai dari yang memahami maknanya hingga yang laah mengucapkannya, terutama apabila terkait dengan suatu peristiwa tertentu. Secara umum, HAM berasal dari tiga kata yaitu “hak” (wewenang), “asasi” (dasar pokok), dan “manusia” (orang-orang, termasuk yang membaca artikel singkat ini). Jadi, terjemahan bebasnya adalah “wewenang dasar pokok orang-orang, baik individu maupun masyarakat”. Namun, apa definisi yang baku tentang HAM? Di samping hak, apakah ada juga kewajiban sebagai padanan katanya, sehingga terjadi harmonisasi antara hak dengan kewajiban berlandaskan asasi manusia?

HAK ASASI MANUSIA

Secara hakiki HAM sebetulnya sudah ada dalam religi sebagai menifestasi dari “mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa” yang antara lain meliputi sikap mengakui keberadaan antar sesama manusia diiringi dengan sikap toleransi dan saling tolong menolong. Secara konstitusional, HAM tercantum dalam UUD 1945 khususnya mulai dari pasal 28A (hak mempertahankan hidup dan kehidupan) hingga pasal 28J (penghormatan dan pembatasan HAM).

Secara implisit HAM juga terkandung dalam Pancasila dengan intisari sebagai berikut: (1) kemerdekaan beragama (sila pertama); (2) kebebasan fundamental (sila kedua); (3) kesadaran kebangsaan (sila ketiga); (4) prinsip demokrasi (sila keempat); dan (5) semangat kebersamaan (sila kelima).

Secara lebih tegas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: “..... *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi*



HUMAN RIGHTS



Oleh: Muhammad Iqbal

Kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam regulasi ini ada sepuluh hak mulai dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hingga hak wanita dan anak.

HAM tidak hanya menjadi ranahnya nasional tetapi sudah menjadi isu global yang awalnya dicetuskan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui dokumen “*the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*”. Dokumen tersebut menjadi tonggak sejarah (*milestone*) standar pencapaian umum hak asasi manusia yang mendasar dan dilindungi secara universal serta telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 500 bahasa. Isinya mencakup 30 pasal (*articles*) mulai dari kebebasan dan kesetaraan dengan martabat dan hak dalam semangat persaudaraan (*article 1*) hingga kemutlakan hak asasi manusia (*artikel 30*).

Sesuai dengan salah satu kata kuncinya yaitu “asasi”, maka HAM dapat disimpulkan secara umum sebagai representasi dari fondasi kebebasan, keadilan, dan kedamaian yang menjadi aspirasi tertinggi masyarakat dalam rangka promosi kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dan kebebasan yang lebih hakiki seraya mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Namun perlu dicatat bahwa HAM harus dilindungi oleh peraturan hukum (*rule of law*).

KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

Manusia cenderung mengutamakan hak dibandingkan kewajiban. Padahal hak dan kewajiban merupakan dua kata yang semestinya sejalan. Sebetulnya, dimana ada hak maka disitu ada pula kewajiban. Banyak contoh kasus yang menunjukkan adanya ketimpangan antara hak dengan kewajiban. Misalnya implementasi program atau proyek untuk kepentingan bangsa dan negara, adakalanya mengalami resistensi dari masyarakat yang lebih mengedepankan hak dari pada kewajiban mereka. Kondisi tersebut menjadi rancu apabila sudah dipolitisasi.

Dalam hak asasi manusia (*human rights*) sebetulnya terkandung makna kewajiban asasi manusia (*human obligation*) yang sekaligus menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dipahami serta dijalankan secara serentak dan berimbang. Banyak orang lupa atau seakan-akan lupa sehingga hak mengecilkan atau bahkan meniadakan kewajiban.

Seperti kata Sigmund Freud, pakar psikoanalisis (1856-1939), salah satu ciri kepribadian manusia adalah "ego" atau "keakuan" yang berlandaskan prinsip realitas (*reality principle*). Sehingga, manusia cenderung lebih menuntut dari pada memberi serta lebih memperhatikan kepentingan pribadi dari pada kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Maka tidak heran apabila di beberapa belahan dunia masih terjadi perselisihan, permusuhan, kekacauan, perang, penindasan, dan fenomena kehidupan negatif lainnya.

Hal yang perlu dicermati dan dipraktikkan adalah seiring sejalannya antara hak dan kewajiban dalam konteks asasi manusia. Hal tersebut mengingatkan manusia pada dasarnya memiliki hati

nurani yang sesungguhnya mampu membedakan mana yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, menguntungkan dan merugikan, taktis dan strategis, serta kepentingan pribadi dan masyarakat baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Setiap pribadi adalah bermanfaat bagi kemaslahatan sesama baik secara langsung di



dalam lingkungannya maupun secara tidak langsung di luar habitatnya, tergantung bagaimana ketatalaksanaannya dibangun dan diimplementasikan secara tepat dan benar.

Akhirnya, begitu penting dan strategisnya HAM, sampai-sampai pemerintah memiliki satu kementerian yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengurus HAM yang disandingkan dengan aspek hukum. Namun hal yang perlu digarisbawahi adalah agar HAM (Hak Asasi Manusia) perlu dikombinasikan secara paralel dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dalam rangka mencapai keseimbangan kehidupan yang hakiki. Kedua hal yang seakan paradoks tersebut yaitu HAM dan KAM seyogianya disatukan agar terjalin keseimbangan dan keadilan. Istilah HAM semestinya tidak hanya berjalan sendiri tetapi sekaligus berbarengan dengan KAM, sehingga tercipta harmonisasi dalam Hak dan Kewajiban Asasi Manusia (HKAM). *Wallahu alam... *****



KEJAHATAN CYBER

KIAN MERAJALELA

SIMALAKAMA DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITAL

Oleh: Jumadi Hariyadi

Teknologi digital adalah sebuah teknologi yang pengoperasionalannya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputer. Pada prinsipnya teknologi ini merupakan sebuah proses dalam mengolah data menjadi informasi yang secara teknis berupa nilai-nilai numeris.

Pada teknologi analog, gambar dan suara diubah menjadi gelombang radio, sedangkan pada teknologi digital mengonversi gambar dan suara menjadi data digital yang terdiri dari bilangan biner berupa angka 1 dan 0. Melalui teknologi digital ini, gambar yang ditampilkan memiliki kualitas warna lebih natural dan resolusinya pun jauh lebih baik. Jika gambar ditampilkan di layar yang besar, tampilannya tetap bagus, tidak pecah atau turun kualitasnya.

Banyak sekali pengaruh bagi kehidupan manusia yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi digital, mulai dari gaya hidup, cara berkomunikasi, hingga dalam bidang *sains*. Khusus di bidang *sains*, teknologi digital dimanfaatkan sebagai media dan alat bantu dalam menyelesaikan aktivitas dan tugas seseorang sesuai dengan bidangnya.

Menurut Arry Rahmawan, kemajuan teknologi digital dapat berupa perkembangan teknologi sosial, media dan bisnis *online* (*e-commerce*).

Aplikasinya bisa lebih dari sekedar internet dan *e-commerce*, tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan lain Internet dan *Social Media*, *Intranet*, *Mobile Content*, *Mobile Based Software*, *Game Software*, *Computer/Desktop Software*, dan *ERP Software*.

KEJAHATAN DALAM DUNIA DIGITAL (CYBER CRIME)

Siapa bilang kemajuan teknologi digital selalu berdampak positif bagi umat manusia? Justru terkadang malah menjadi ancaman bagi generasi muda, terutama dalam kaitannya dengan pelestarian budaya bangsa. Salah satu contohnya kita bisa menyimak hasil penelitian Institut Seni Indonesia (ISI) pada 2011 yang mengungkapkan bahwa kaum muda di Bali mengalami penurunan kreativitas dalam berkesenian.

Hasil penelitian perguruan tinggi tersebut lebih jauh menjelaskan bahwa penyebab perilaku generasi muda yang mulai bergeser tersebut ternyata disebabkan oleh kebiasaan mereka bermain *game online* dan mengadopsi budaya-budaya sekuler Barat. Teknologi digital memang terbukti mampu membius generasi melupakan jati diri mereka sebagai orang Timur yang memiliki budaya luhur yang baik dan wajib kita lestarikan.

Selain itu, tidak jarang kemajuan teknologi digital juga mampu mengganggu ekonomi dan keamanan secara nasional, terutama jika disalahgunakan oleh orang-orang cerdas yang bermental kriminal. Kenyataannya tidak sedikit pelaku kejahatan *cyber* yang merajalela di dunia



Gambar oleh: Google

maya. hasil sebuah survei yang dilakukan oleh *Small Business Technology* pada 2013, sebanyak 845 pemilik usaha kecil dan menengah dari berbagai jenis industri di Amerika Serikat menderita kerugian sebesar \$8700 setahun akibat pelaku kejahatan *cyber*.

Tingkat kejahatan dalam dunia digital (*cyber crime*) di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Bahkan, menurut Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) edisi 6 Desember 2015, pada kuartal kedua 2013, Indonesia menempati posisi negara terbesar pertama yang menjadi target serangan *cyber* dunia dan menjadi negara yang memiliki risiko *cyber* tertinggi (38%). Sementara itu China menempati urutan kedua (33%) dan Amerika Serikat di posisi ketiga (6,9%).

Menurut catatan Kompas.com, dalam periode 2011-2013 terjadi serangan *Cyber* sebanyak 3,9 juta kali di Indonesia. Umumnya *website* yang mendapat serangan merupakan milik pemerintah yang memiliki ekstension *go.id*.

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Septriana Tangkary, pada Seminar "Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Menangani berbagai kasus Penyalahgunaan IT di Kalangan Siswa" di Surabaya, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa berdasarkan Data *Cyber Crime* Indonesia Tahun 2012-2015 terdapat 36.6 juta serangan *cyber crime* yang dilakukan oleh 497 orang tersangka (389 WNA, 108 WNI) dengan dampak kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 33.29 milyar. "Ribuan anak Indonesia telah menjadi korban kejahatan internet, bahkan dalam satu hari ada 300 anak yang menjadi korban. Mulai dari kasus penculikan, perkosaan, *bullying* dan lainnya. Ini harus menjadi perhatian kita dalam melindungi anak-anak dari bahaya kejahatan internet," jelas Septriana.

Sementara itu, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) pun mencatat bahwa Indonesia

menempati posisi keempat sebagai pelanggan telepon seluler terbesar di dunia dengan jumlah pemakai sebanyak 249 juta orang. Tentu saja hal tersebut, mempunyai implikasi yang besar jika terjadi serangan *Cyber*, karena dapat mengancam ekonomi dan keamanan nasional Indonesia.

Akhir-akhir ini marak terjadi kejahatan dalam dunia digital yang dilakukan oleh sekelompok pelaku kriminal. Mereka memanfaatkan kemahirannya dalam penguasaan teknologi informasi untuk mencari keuntungan secara tidak sah. Modus yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari penipuan, pencurian data, sampai sabotase terhadap situs-situs milik pemerintah.

Beberapa kasus yang sempat heboh diantaranya adalah kasus pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Kediri, Jawa Timur. Menurut laporan Kompas, nasabah yang menjadi korban 84 orang, yang terdiri dari 33 orang nasabah Cabang BRI Ngadiluwih dan 51 orang lainnya dari Cabang BRI Purwokerto.

Kasus tersebut diduga kuat berhubungan erat dengan kejahatan perbankan dengan metoda *skimming*, yaitu pencurian data nasabah dengan



Gambar oleh: Google



Tim IT Setjen Wantannas

menggunakan perangkat yang dipasang pada mesin ATM. Pada kasus tersebut, belasan uang nasabah BRI Ngadiluwih tiba-tiba hilang secara misterius.

Pada terbitan edisi Jumat 16 Maret 2018, *Tempo online*⁵ melaporkan bahwa Polda Metro Jaya telah terjadi penangkapan terhadap sindikat pembobol rekening nasabah BRI. Ada lima orang anggota sindikat yang berhasil ditangkap yaitu tiga orang warna negara Rumania, 1 orang warna negara Hungaria, dan 1 orang warga negara Indonesia.

Dalam penangkapan tersebut pihak polisi mengaku telah mengamankan berbagai alat bukti untuk mencuri data nasabah bank, seperti *deepskimmer* yang sudah jadi, *encoder*, dan tiga unit *spycam*. Berdasarkan hasil investigasi sementara, aksi kejahatan yang dilakukan sindikat ini telah dilakukan sejak Juli 2017.

Sementara itu, kantor berita CNN Indonesia mengungkapkan bahwa kasus kejahatan *cyber* menjadi kasus paling banyak yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya di sepanjang 2016. Berdasarkan laporan tersebut terdapat 1.627 kasus yang ditangani polisi, 1.207 kasus di antaranya merupakan kasus *cyber crime* dan baru 699 kasus yang berhasil diselesaikan.

SERANGAN CYBER CRIME TERHADAP FASILITAS PEMERINTAH ATAU NEGARA

Jumlah serangan *cyber* diseluruh penjuru dunia kian meningkat, baik yang dilakukan oleh personal, berkelompok, maupun oleh institusi

negara. Motifnya tentu bermacam-macam, mulai dari sekadar uji coba kemampuan diri, mencari uang, bisnis, maupun kepentingan politik.

Situs *kompas.com* edisi 13 Mei 2017 menurunkan berita adanya serangan *cyber* berskala raksasa yang menggunakan perangkat peretas yang diyakini dikembangkan *National Security Association* (NSA) Amerika Serikat telah menyerang sejumlah institusi dan organisasi di dunia. Otoritas terkait di berbagai negara telah berupaya mengamankan jaringan komputernya dengan memperbaharui sistem dari kemungkinan serangan peretas.

Serangan *cyber* di dunia diperkirakan melanda 99 negara, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, China, Italia, dan Spanyol. Bahkan, perusahaan keamanan *cyber* terkenal, Avast, mengaku telah mendeteksi adanya serangan *cyber* sebanyak 75.000 kasus di seluruh dunia yang mereka juluki *WCry* atau *WannaCry*.

Menurut berita yang dilansir dari situs berita Okezone, serangan *Cyber Ransomware* sempat menyerang Indonesia pada awal 2017. Setidaknya dua rumah sakit di Jakarta yaitu Rumah Sakit Dharmais dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang disinyalir diserang *Ransomware* berjenis *WannaCry* pada 12 Mei 2017 yang mengakibatkan data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit tidak bisa diakses.

Tentu serangan tersebut berdampak buruk terhadap pelayanan rumah sakit dan sempat menimbulkan kehebohan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera turun tangan membantu

mengatasi masalah tersebut. Menkominfo Rudiantara, menggelar temu media pada 14 Mei 2017 dan mengatakan bahwa Kemenkominfo telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dharmais untuk menanggulangnya.

Kementerian ini sigap mempersiapkan tim khusus menghadapi persoalan ini yang antara lain meliputi Direktorat Jenderal Keamanan Kominfo dan pegiat keamanan *cyber* serta bekerjasama dengan sejumlah pihak dari luar Indonesia. Pada 17 Mei 2017 Menkominfo mengklaim Indonesia sudah bebas Virus *Ransomware WannaCry* yang sebelumnya menginfeksi setidaknya 200 ribu komputer di seluruh dunia.

MENYIKAPI FENOMENA CYBER CRIME

Selama ini keamanan siber (*cyber security*) Indonesia secara faktual baru diawasi oleh *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII), *Indonesia Computer Emergency Response Team* (ID-CERT), dan Sub Direktorat *Cyber Crime* Direktorat Tingkat Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Namun, ini saja rasanya belum cukup. Rasanya pemerintah perlu membuat sebuah sistem keamanan terpadu yang khusus membidangi masalah *cyber crime* yang didalamnya terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan berbagai unsur terkait diluar lembaga pemerintahan demi meningkatkan keamanan nasional.

Masalah kejahatan dalam dunia digital tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Negara tidak boleh diam dan harus melakukan perannya secara serius. Kalau hal ini tidak bisa diantisipasi dengan baik, bukan mustahil negara akan dipermalukan dan reputasi pemerintah akan turun.

Kejahatan digital bukan saja dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jaringan yang kuat dan terorganisir. Namun, ada juga yang dilakukan oleh perseorangan. Tidak sedikit orang-orang jenius dan memiliki kemampuan IT di atas rata-rata yang bernasib kurang beruntung di negeri ini. Iman yang lemah dan pemahaman agama yang sempit membuat mereka menjadi liar dan akhirnya memilih jalan yang salah. Mereka ibarat jenderal tanpa pasukan yang memilih berperang di medan tempur yang salah.

Para penjahat *cyber* ini ibarat hewan liar yang bebas melancarkan aksinya. Mereka melakukan serangan secara sporadis terhadap objek tertentu, misalnya sebuah *website* milik pemerintah atau perusahaan ternama. Tujuannya ada yang hanya sekadar unjuk kebolehan dan ingin dapat pengakuan bahwa dirinya lebih pintar dari pembuat atau pengelola *website* yang berhasil diserangnya, tetapi ada juga yang bertujuan untuk memperkaya diri.

Menyikapi fenomena seperti tersebut di atas, sebaiknya pemerintah mengambil sikap proaktif. Kalau perlu diadakan perekrutan untuk menampung



orang-orang jenius yang memiliki kemampuan IT di atas rata-rata. Mereka diberi pekerjaan sesuai dengan keahliannya serta diberi penghasilan yang layak. Dalam proses rekrutmen sebaiknya dibentuk

tim khusus yang melibatkan unsur lain di luar pemerintahan, misalnya tenaga ahli atau *expert* di bidang tertentu yang relevan dan memiliki kemampuan IT di atas rata-rata. Mereka diberi pekerjaan sesuai dengan keahliannya serta diberi penghasilan yang layak. Dalam proses rekrutmen sebaiknya dibentuk tim khusus yang melibatkan unsur lain diluar pemerintahan, misalnya tenaga ahli atau *expert* di bidang tertentu yang relevan.

Mereka perlu mendapat pembinaan secara khusus. Itu lebih baik daripada ilmunya disalahgunakan. Lebih baik mereka dipelihara oleh negara dan menjadi tentara-tentara cyber yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi untuk membela kepentingan bangsa dan negaranya.

Siapa saja yang pantas direkrut? Tentu saja orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang *cyber* dan terbukti mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Persyaratan mengikuti tes ini jangan dibatasi hanya untuk orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan formal saja. Mereka yang pernah belajar IT secara otodidak pun diperbolehkan mengikuti seleksi, asal mereka bisa lolos dalam tes yang diadakan.

Salah satu bentuk tes misalnya mereka diminta untuk meretas sebuah situs yang memang dibuat oleh pakar IT dengan sistem keamanan yang canggih. Para kandidat ini di karantina dan diberi waktu tertentu untuk menjebol sistem keamanan situs yang dijadikan sebagai objek ujian. Tes lainnya

lagi misalnya bagaimana cara mereka menghilangkan jejak digital setelah melakukan peretasan, sehingga tidak bisa dilacak oleh pihak keamanan.

Setelah proses rekrutmen, para calon pasukan *cyber* ini akan mendapatkan gemplengan tambahan dari pihak pemerintah berupa pelatihan selama beberapa bulan. Mereka diajarkan tentang bela negara, nasionalisme, kebangsaan, moral dan agama, teknologi informasi, sistem keamanan dan lain sebagainya.

Apa tugas pasukan *cyber* ini? Mereka akan membuat sistem keamanan semua *website* milik pemerintah, terutama milik lembaga-lembaga vital negara seperti kepresidenan, Lembaga DPR, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Mereka juga akan dilatih untuk menjebol sistem pertahanan musuh dalam kondisi perang (*cyber war*) untuk membobol *website* mereka dan meretas data-data penting milik lawan.

Sehubungan dengan kerjanya dibalik layar, tentu perlakuan terhadap orang-orang seperti ini tidak boleh dimunculkan di publik. Mereka ada tetapi seperti tiada. Mereka aset penting negara yang perlu mendapat perlindungan khusus dari pemerintah. Tentu saja mereka diberi gaji dan insentif yang layak, sehingga tidak sampai tergiur bujukan pihak lain yang membuat mereka tergiur dan pindah ke lain hati. ****



Foto: internet



KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan, memasuki 2018, program pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Untuk itu, pihaknya akan mengawal agenda reformasi ekonomi, termasuk pada sisi fiskal.

Kondisi ekonomi makro dan global, menurut Sri Mulyani, akan memengaruhi arah kebijakan pemerintah di tahun 2018. Ekonomi dunia tumbuh 3% sudah cukup bagus sesudah terjadinya krisis global. Untuk tahun 2018, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih kuat yaitu 3,6%.

Indonesia sebagai negara yang mengandalkan mesin pertumbuhan ekonomi ekspor akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan volume perdagangan dunia dan transaksi perdagangan antarnegara. “Namun, kami mengantisipasi adanya *headwind* atau angin yang berasal dari depan yang akan berpotensi memperlambat lajunya ekonomi dunia.

Terutama, masalah politik global. Tahun 2017 adalah tahun di mana banyak diselenggarakan pemilu di berbagai negara. Isu nasionalisme dan *inward-looking* sangat kental dalam masa pemilu, yang akan menular kepada kebijakan perdagangan

yang cenderung proteksionis.

Hal lain yang harus dilihat sebagai faktor yang akan memengaruhi ekonomi dunia, tren atau arah kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan China. AS dan negara-negara Eropa menerapkan normalisasi. Artinya, jumlah uang beredar dikurangi atau *interest rate* dinaikkan. Karena itu, negara-negara berkembang harus siap menghadapi kecenderungan suku bunga global yang lebih tinggi.

BAGAIMANA INDONESIA MENYIKAPI LINGKUNGAN MAKRO SEPERTI ITU?

Kebijakan ekonomi Indonesia dikenal cukup memiliki rekam jejak yang baik. Di Indonesia, salah satu yang menjadi sumber stabilisasi adalah persepsi bahwa kita memiliki kebijakan yang baik dan *prudent*. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun berorientasi pada solusi atau pragmatis. Ini harus dimunculkan dalam berbagai langkah, baik dari kebijakan fiskal pada APBN, kebijakan sektoral dari kementerian, maupun kebijakan regional dari pemerintah daerah.

Kebijakan ekonomi terdiri dari tiga area, yaitu kebijakan fiskal yang terlihat dari APBN, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil.

Agar tiga kebijakan ini bisa menghasilkan dampak yang positif, sinergi dari ketiga kebijakan itu merupakan hal penting.

Kebijakan ekonomi Indonesia dari sisi kebijakan fiskal ditujukan untuk memperkuat potensi ekonomi. Pertama, pengembangan manusia. Ini adalah fokus yang akan terus ditingkatkan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mencapai Rp 440 triliun untuk tahun 2018, yang sebagian besar (hampir 2/3) dibelanjakan melalui daerah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota. Di bidang kesehatan, anggaran sebesar Rp 105 triliun akan dibelanjakan pada 2018. Jadi, Indonesia akan membelanjakan hampir Rp 550 triliun hanya untuk dua sektor tersebut.

Untuk infrastruktur, jumlah anggarannya mencapai lebih dari Rp 400 triliun di tahun 2018. Ini akan dipakai untuk membangun hard infrastructure, mulai dari jalan, bandara, kereta api, bendungan, hingga listrik.

Kebijakan fiskal pada 2018 tetap diarahkan pada tiga strategi utama, yakni optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan. Dengan begitu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun akan semakin diperkuat.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4 persen dan penurunan pengangguran menjadi 5-5,3 persen. Menurunkan kemiskinan

hingga berada di bawah 10 persen serta turunnya rasio gini menjadi 0,38. Sepanjang 2017, defisit fiskal terjaga pada tingkat yang manageable 2,19 persen, tanpa mengurangi daya stimulus APBN untuk menjaga momentum perekonomian karena pemerintah terus berfokus pada belanja yang produktif. Indonesia telah menunjukkan, dengan kerja bersama, perekonomian makin tumbuh baik. APBN dengan fungsinya yang sangat vital merupakan sebuah alat untuk memperkuat social cohesion antar rakyat Indonesia.

Namun upaya mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan, perlu lebih dari sekadar kebijakan fiskal dan APBN. Penguatan kerangka institusi dan sinergi, baik institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan, sangat penting. Untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi, peranan APBN sangat penting. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 telah memberikan rambu-rambu yang baik untuk menjaga pengelolaan APBN dilakukan secara prudent dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Defisit kumulatif APBN dan APBD maksimal diperkenankan 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan tingkat utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB. Dalam sepuluh tahun terakhir, defisit fiskal Indonesia rata-rata 1,6 persen. Sementara itu, tingkat utang saat ini dapat dijaga di bawah 30 persen, menurun tajam sejak 2000 yang mencapai 89 persen PDB.**** (dfn)



Gambar oleh: Google



UPAYA MENEMBUS

Oleh: Desi

Untuk menindaklanjuti hasil diskusi yang terjalin sebelumnya antara Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 6 Maret lalu, kembali Plt. Sesjen Wantannas menghadiri undangan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan–Sekretariat Kabinet (Setkab) guna membahas Rancangan Instruksi Presiden tentang Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019, Rabu (21/03/2018).

Pada pertemuan sebelumnya, telah disampaikan oleh Pramono Anung terkait dengan rancangan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Bela Negara, dimana pada saat itu, ia menyarankan kepada Setjen Wantannas agar menyusun Instruksi Presiden (Inpres) saja untuk memperkuat validasi organisasi Wantannas. Mengenai proses

penyusunannya nanti, akan dibantu oleh Setkab.

Salah satu pembahasan dalam Rancangan Inpres yang disusun oleh Setjen Wantannas adalah mengatur bagaimana modul tersebut menjadi modul umum yang nantinya secara faktual menjadi referensi utama bagi K/L dalam melaksanakan bela negara. Adapun modul bela negara yang telah disusun oleh Setjen Wantannas ada sebanyak 5 yaitu:

- Modul 1: Membahas tentang Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara;
- Modul 2: Membahas tentang Konsepsi Kebangsaan;
- Modul 3: Membahas tentang Supremasi Hukum dan Etika Moral;
- Modul 4: Membahas tentang Kearifan Lokal;
- Modul 5: Membahas tentang Tujuan dari Bela Negara.



PAYUNG HUKUM BELA NEGARA

Namun, menurut Anjak Bidang SDM Kolonel Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc selaku Sekretaris Pokja Bela Negara Setjen Wantannas yang juga hadir di acara itu, kelima modul tersebut tidak dapat menjadi referensi utama sebelum ada perintah dari Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Inpres.

Hal senada disampaikan juga oleh Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Setjen Wantannas Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM, "Di 2017 lalu Setjen Wantannas telah membuat semacam kalender kegiatan bela negara berikut penyusunan modul-modulnya. Intinya modul-modul tersebut diharapkan menjadi pedoman umum bagi seluruh K/L dengan catatan masing-masing K/L menyesuaikan dengan kondisi organisasinya," tambah Toto.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan–Sekretariat Kabinet Fadlansyah Lubis, mengatakan bahwa modul-

modul tersebut memang sudah siap digunakan. "Dalam waktu dekat, kita berfikir dan upayakan untuk memproses Inpres secepatnya, karena ini memang arahan Presiden dan Pramono Anung juga sudah bicara ini harus segera. Kemarin memang, pada Sidang Kabinet diputuskan untuk mengajukan Perpres. Itu yang agak lama karena Perpres itu harus masuk ke Menpan dulu. Disitu ada kendala, karena pada hakekatnya, Perpres tidak hanya bicara bagaimana Setjen Wantannas berperan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan bela negara, tapi juga ada unsur perubahan organisasi," demikian yang dikatakan Fadlansyah.

Pada forum tersebut Setkab menghadirkan pejabat-pejabat terkait seperti Asisten Deputi Pertahanan Keamanan Komunikasi dan Informatika Edwin J.H.W. Visang, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadlansyah Lubis dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara Purnomo Sucipto.****

PELAJARI MASALAH DI DAERAH MELALUI KAJIDA

Oleh: Desi



Tim Kajida Kedeputian Sistem Nasional Setjen Wantannas

KAJIDA DESISNAS KE KABUPATEN NATUNA

Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Aris Martono Haryadi memimpin rombongannya ke Kabupaten Natuna, Tanjung Pinang guna menggali data dan informasi terkait dengan proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Natuna, mengingat secara geografis Natuna berada pada posisi strategis yaitu berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia tenggara seperti Malaysia,

Vietnam, Thailand dan Kamboja.

Tim ini mendapati bahwa, sampai saat ini sudah banyak calon penanam modal yang menawarkan pengembangan usaha, namun masih terkendala Izin Hak Pengolahan Lahan yang pengurusannya berada ditingkat Kementerian. Oleh sebab itu, diharapkan ada solusi untuk menyikapi kendala tersebut, karena jika perusahaan perkebunan dapat beroperasi di Kabupaten Natuna, akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui lapangan pekerjaan baru.

Diketahui pula, Kabupaten Natuna memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah, idealnya mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada diwilayah perbatasan.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui penyelenggaraan Kajida Setjen Wantannas ini berharap, segala data dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan dan diteruskan kepada Presiden RI untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya strategis pertahanan wilayah kedaulatan NKRI.****

KAJIDA DEPOLSTRA KE KABUPATEN MUARO JAMBI

Provinsi Jambi menjadi pilihan pelaksanaan Kajida yang dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH. Faktor utamanya adalah keingintahuan terhadap dampak dari keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya jalan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Provinsi Jambi menghadapi banyak masalah serius dalam pembangunan akibat keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur di kedua obyek pembangunan tersebut.

Di sisi lain, hal ini berimbas pada belum seluruhnya sektor pembangunan dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tak hanya itu, masalah kelambanan pembangunan agroindustri, minimnya kontribusi sektor pertambangan terhadap ekonomi masyarakat dan daerah, masih rendahnya pendidikan tenaga kerja serta masih banyaknya penduduk miskin ikut ambil bagian.

Melalui Kajida Setjen Wantannas ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap dapat terjalin



Tim Kajida Kedeputian Politik dan Strategi Setjen Wantannas

hubungan kerjasama bahu membahu serta koordinasi antar sektor dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengupayakan keberlangsungan pembangunan yang efektif. Bukanlah mustahil, terwujudnya sinkronisasi antara program dan kegiatan yang terjalin di setiap sektor dan tingkatan pemerintah akan menghasilkan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat.****



Tim Kajida Kedepuitan Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas

KAJIDA DEJIANDRA KE SUMATERA UTARA

Sumatera Utara yang beribukota Provinsi Medan merupakan wilayah Indonesia yang memiliki potensi alam dan sumberdaya manusia yang sangat besar. Hasil pengamatan dan peninjauan lapangan Tim yang dipimpin oleh Laksma TNI Eko Purwanto, S.AP selaku Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional ini, didapati fakta bahwa banyak

titik potensial di sana yang dapat dikembangkan secara masif. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang sudah beroperasi sejak Agustus 2017 lalu. Pelabuhan utama yang bertaraf internasional ini menjadi prioritas pembangunan infrastruktur pemerintah guna mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Tim Kajida Kedepuitan Pengkajian dan Penginderaan menilai pelabuhan ini akan menjadi simbol kekuatan NKRI di Selat Malaka yang dikenal teramai di dunia dan menjadi penyambung ke pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Namun demikian, selain pelabuhan, infrastruktur jalan pun disiapkan hingga 10 tahun ke depan. Untuk itu, arus logistik melalui laut dengan pelabuhan sebagai sarana utamanya, harus didukung terutama pada akses jalan dari dan menuju pelabuhan. Pelabuhan Kuala Tanjung berdasarkan pengamatan Tim Kajida, menjadi titik penentu dalam menyuplai kebutuhan energi di Sumatera Utara yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi dan industri di Sumatera Utara. ****

KAJIDA DEBANG KE MOJOKERTO

Kedepuitan Bidang Pengembangan Setjen Wantannas melaksanakan Kajida ke Mojokerto dengan dipimpin oleh Marsda TNI Emir Panji Dermawan, S.Sos selaku Deputi Bidang Pengembangan. Data dan informasi yang diperoleh salah satunya adalah permasalahan tenaga kerja. Terkait itu, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, menjelaskan bahwa data penyerapan tenaga kerja di tahun 2017 sekitar 3.581 orang, dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 3.565.660,28. Sedangkan Outsourcing terbagi dua yaitu Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (PPJP) dan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan Penunjang (PPPP). PPJP yang didaftarkan ke Disnaker Kabupaten Mojokerto tahun 2017 sebanyak 21 perusahaan, dan sampai Maret 2018 ada 9 perusahaan. Sementara untuk PPPP tercatat 14 perusahaan pada 2017 dan 7 perusahaan sampai dengan Maret 2018. Perbandingan tenaga kerja lokal dengan pendatang yakni 2.866 (lokal) dan 715 (pendatang).

Pada sisi lain, Mojokerto sebagai salah satu kawasan metropolitan di Surabaya, membawa dampak merebaknya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Diungkap oleh Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata, S.Sos, S.IK, MH, Sepanjang tahun 2017, jumlah kasus narkoba



Tim Kajida Kedepuitan Pengembangan Setjen Wantannas

terungkap ada 131 kasus narkoba dengan 179 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 144,389 gram sabu, 804,61 gram ganja, dan 68.308 butir pil dobel L. Jumlah tersebut naik 9% dibandingkan tahun 2016. Untuk itu, Kapolres berharap ada mitra kepolisian dalam pemberantasan narkoba yaitu dengan segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Mojokerto. ****

Senin (12/03/2018) bertempat di *Situation Room*, Lantai 5B Kantor Setjen Wantannas, diselenggarakan kegiatan rutin dalam bentuk forum komunikasi dan informasi yaitu *Coffee Morning* (CM). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap senin pagidalam rangka penguatan dan konsolidasi internal Setjen Wantannas.

Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Eselon

diketahui, salah satu kegiatan andalan Setjen Wantannas yang tertera dalam Rencana APBN-P tersebut yaitu Bela Negara, menjadi program prioritas, dimana selama ini program tersebut masih terkatung-katung pelaksanaannya.

Untuk itu, Plt. Sesjen Wantannas Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH menginstruksikan agar dibuat kembali Tim Bela Negara yang diketuai oleh Deputi Bidang Sistem Nasional dan Staf Ahli Bidang Pertahanan dan



I, II, dan III kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Umum Brigjen TNI Afanti S Uloli, SE, M.Si. Salah satu agendanya adalah pelaporan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu minggu kedepan dari masing-masing unit kerja serta penjelasan tentang penyusunan laporan kegiatan secara berkala pada setiap bulan. Demikian halnya pada penyusunan Laporan Keuangan, harus diselesaikan secara berkala juga agar para pengguna dan pengelola anggaran mengetahui seberapa besar anggaran yang sudah terserap dan seberapa banyak kegiatan yang harus segera direalisasikan pelaksanaannya.

Sementara itu, yang menjadi isu utama dalam CM kali ini adalah persiapan menghadapi rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2018. Perlu

Keamanan sebagai Wakil Ketua.

Selain Bela Negara, topik lain yang menjadi sorotan adalah Seminar dan Lokakarya (Semiloka) dengan Perguruan Tinggi maupun Kementerian atau Lembaga. Tjetjep menghimbau agar pemilihan tema dan topik sebaiknya diambil dari kegiatan yang menjadi program-program prioritas Presiden. Untuk itu, Tjetjep menginginkan agar seluruh pihak memanfaatkan secara optimal infrastruktur Setjen Wantannas seperti *Situation Room* berikut sarana dan prasarana di dalamnya dalam menyusun kajian, telaahan atau pelaporan.

Hal-hal yang menjadi pembahasan dalam *Coffee Morning* semata-mata sebagai upaya Pimpinan Setjen Wantannas untuk melakukan pembenahan dan penguatan fungsi organisasi Setjen Wantannas.**** (Enang Suhendar)



FORSES PERKUAT SILATURAHMI JAGA KEKOMPAKAN

Jumat (2/03/2018) Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH hadir dalam acara Silaturahmi Forum Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama, Kasum TNI, Asrena TNI, Polri dan Sekda yang berlangsung di Pulau Ayer Kepulauan Seribu. Sebagai penyelenggara adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Sestama BNPP) RI, Dadang Arkuni, SE, MM.

Sebagai pembuka, ditayangkan video berdurasi singkat yang menggambarkan tentang Profile BNPP. BNPP yang semula bernama Badan SAR Nasional (Basarnas), kemudian oleh Presiden Joko Widodo diubah namanya menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 September 2016 lalu. "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian dikatakan oleh Sestama BNPP.

Lebih lanjut ditambahkan olehnya, "Forum ini semata-mata bukanlah sekedar pertemuan biasa, akan tetapi lebih ditujukan pada kekompakan

antar sesama peserta yang diharapkan dapat membangun kerjasama lebih erat lagi dengan BNPP," tambah Sestama.

Menurut Pengarah acara Forum Sekretaris (Forses) Letjen TNI Yoedhi Swastono, BNPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala. BNPP memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi BNPP. Demikian juga seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Basarnas tetap melaksanakan tugas dan fungsi tanpa harus ada perubahan yang berarti.

Selain memperkenalkan profil barunya, acara ini juga diisi dengan kegiatan seperti olah raga bersama, *outbond* dan *fun game*. Sebagai penutup acara, diakhiri dengan foto bersama oleh seluruh peserta diikuti oleh Puteri Pariwisata Indonesia 2017.**** (dfn)



GUNA JAGA KETERTIBAN BERKENDARA, PLT. SESJEN WANTANNAS PERIKSA RANDIS

Kamis (1/03/2018), bertempat di Lapangan Barat Daya Monas, Plt. Sesjen Wantannas Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH mengadakan Apel Kendaraan Dinas (Randis) Roda 2 dan 4. Kegiatan yang baru pertama kali diadakan di lingkungan Setjen Wantannas ini bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan sarana dan prasarana khususnya Randis serta segala kelengkapannya seperti SIM dan STNK.

Pemeriksaan fisik Randis dan atributnya juga dimaksudkan sebagai pembuktian terhadap kepatuhan dan loyalitas kepada Pimpinan.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Plt. Sesjen Wantannas sekaligus menjabat Deputy Bidang Politik dan Strategi mendapat apresiasi yang baik dan antusias di kalangan warga Setjen Wantannas. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala, karena banyak manfaat yang dirasakan, salah satunya yaitu timbulnya kesadaran terhadap kepatuhan dan kedisiplinan terutama dalam berkendara. Efek positif ini diharapkan dapat menjalar pada sendi kehidupan yang lain misalnya dalam lingkungan

kekerabatan maupun dalam bersosialita.

Sebagai penutup kegiatan, Tjetjep berpesan kepada setiap personel yang membawa Randis maupun kendaraan pribadi agar selalu berhati-hati dan secara seksama memeriksa kondisi kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. **** (dfn)



Plt. Sesjen Wantannas Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH (mengenakan batik) usai memeriksa Randis dan memberikan pengarahan kepada personel Setjen Wantannas di Lapangan Barat Daya Monas



MENKOPOLHUKAM DAN PLT. SESJEN WANTANNAS BAHAS PROGRAM BELA NEGARA

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH dengan didampingi para Deputi, Staf Ahli dan Kepala Biro di lingkungan Setjen Wantannas melaksanakan Audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam RI Jalan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Sementara Menkopolhukam RI oleh Sekretaris Menteri Letjen TNI Dr. Yoedhi Swastono, MBA, Deputi Bidang Pertahanan Negara Laksda TNI Achmad Djamaludin, M.A.P, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Carlo B. Tewu. serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Iptek Mayjen TNI Wawan Kustiawan.

Pembahasan utama Audiensi ini yaitu Program Bela Negara yang sebenarnya sudah beberapa kali disosialisasikan kepada K/L dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wantannas dan Pertemuan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas).

Menurut Wiranto, bela negara pada masa lalu sangat indetik dengan militerisme. Hal ini tidak terlepas dari ancaman yang dihadapi pada masa tersebut yang dapat didefinisikan ancaman secara militer. Sehingga pertahanan bela negara harus kuat dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai kekuatan cadangan yang perlu untuk dilatih secara militer.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, berkembang pula ancaman yang juga bersifat multi dimensional dan sangat beragam serta mengalami perubahan secara total. Ancaman tersebut diantaranya ancaman siber, ancaman dalam bentuk dimensi lainnya, *froxy war*, dan lain-

lain. Faktor-faktor tersebut diatas, lambat laun merubah konsep pertahanan yang semula statis menjadi dinamis. Perubahan inilah yang harus diwadahi melalui program bela negara.

Pada saat bersamaan, Plt. Sesjen Watannas menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar masalah bela negara diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Wantannas dengan tidak membentuk organisasi baru. Hal ini tertuang di dalam surat Sekretaris Kabinet tertanggal 3 Februari 2017.

Selanjutnya, Setjen Wantannas sebagai penanggung jawab program bela negara sudah menyiapkan modul umum yang nantinya *diabsorb* oleh K/L terkait, dan K/L tersebut menyusun modulnya berdasarkan modul umum Setjen Wantannas yang disesuaikan dengan kebutuhan bela negara di lingkungan masing-masing.

Mengenai substansi modul bela negara, diperoleh dari naskah kajian Setjen Wantannas yang bersifat aspiratif, akademik, dan kelembagaan. Untuk payung hukumnya sendiri, disarankan oleh Sesmenko Polhukam Letjen TNI Yoedhi Swastono, sebaiknya bukan Peraturan Presiden (Perpres) melainkan Instruksi Presiden (Inpres), dengan pertimbangan bahwa tugas pokok Setjen Wantannas adalah membuat rumusan atau rancangan strategis terhadap pembinaan ketahanan nasional, dimana sebagian kecilnya adalah program bela negara.

Disarankan juga agar Setjen Wantannas menyiapkan modul dan materi untuk disampaikan pada Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Selanjutnya melalui Rapat Terbatas ini, dapat secara paralel didorong agar Program Bela Negara Setjen Wantannas dapat terealisasi dari segala unsur.**** (dfn)

INILAH FAKTA-FAKTA TENTANG STEPHEN HAWKING

Rabu (14/03/2018) dunia kehilangan salah satu ilmuwan terhebat abad ini yakni Stephen Hawking. Fisikawan Teoritis yang lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford itu mengembuskan napas terakhir di rumahnya di daerah Cambridge. Hawking meninggal dunia di usia 76 tahun.

Hawking dikenal dengan karyanya di bidang fisika kuantum terutama teori-teorinya seputar seputar kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking.

Stephen Hawking didiagnosa menderita Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), sebuah penyakit yang akan membuat seluruh otot dalam tubuhnya tidak berfungsi, meski kemampuan otak tidak akan menurun. Dokter sendiri menyatakan bahwa Stephen tidak akan bertahan hidup lebih dari dua tahun. Stephen terus melanjutkan penelitiannya guna menemukan *theory of everything*, sebuah teori yang ia percaya dapat menjelaskan semua aspek di alam semesta.

Selain kontribusinya dalam *Science* (terutama Kosmologi), kehidupannya juga memiliki banyak hal menarik untuk diketahui. Berikut beberapa fakta menarik tentang dirinya dan kehidupannya yang mungkin belum Anda ketahui.

1. NILAI SEKOLAHNYA BIASA-BIASA SAJA, BAHKAN BURUK

Hawking adalah seorang pemalas ketika masih duduk di bangku sekolah. Bahkan, ketika berusia 9 tahun, nilai-nilainya tergolong paling buruk di kelasnya. Saat itu ayahnya ingin mengirimnya ke Oxford, tapi tidak punya uang tanpa beasiswa. Untungnya, ketika ujian beasiswa, ia mendapat nilai bagus, bahkan mendekati sempurna pada ujian fisika.

2. HANYA PUNYA HARAPAN HIDUP BEBERAPA TAHUN DI USIA 21 TAHUN

Ketika Hawking memasuki usia 21 tahun ia mulai menunjukkan gejala kejanggalkan fisik. Ia kemudian didiagnosis menderita Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), juga dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig, penyakit neurologis yang menyebabkan pasien kehilangan kontrol *voluntary muscle* (otot yang geraknya dapat dikontrol). Kemungkinan ia hanya memiliki beberapa tahun untuk hidup. Hawking pun *shock*. Namun, melihat



Foto: Internet

Seorang anak leukemia yang sekarat di rumah sakit membuatnya sadar bahwa ada orang lain yang lebih parah darinya.

3. PENULIS BUKU ANAK-ANAK

Banyak yang mengenalnya hanya sebagai seorang ilmuwan, namun siapa sangka Stephen Hawking adalah seorang penulis buku anak-anak. Pada 2007, Stephen dan putrinya, Lucy Hawking, berkolaborasi untuk menulis *George's Secret Key to the Universe*. Buku ini menceritakan seorang anak bernama George yang memberontak terhadap keengganan orang tuanya pada teknologi terutama komputer. Pada akhirnya ia mendapati ternyata komputer itu merupakan teknologi yang paling kuat di dunia, serta memiliki portal untuk melihat dan masuk ke luar angkasa.

4. PERCAYA KEMUNGKINAN ADANYA ALIEN

Hawking pernah membuat tayangan tentang kemungkinan adanya alien berjudul *Into the Universe with Stephen Hawking* di *Discovery Channel*. Dalam tayangan itu, dijelaskan bahwa alien mungkin menggunakan sumber daya planet mereka sendiri dan "menjadi pengembara yang ingin menaklukkan dan mengkolonisasi planet apapun yang bisa mereka capai."

Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai IQ dari Stephen Hawking. Namun, Hawking sendiri tidak terlalu peduli soal itu. Ketika ditanyakan mengenai IQnya pada 2004, Hawking menjawab, "Saya tidak tahu. Orang yang membanggakan IQnya adalah seorang pecundang." **** (yr)



TRANSFER EGY MAULANA VIKRI DAN POTENSI SEPAKBOLA INDONESIA

Foto: Internet

Oleh: Yayat Ruhiat

Egy Maulana Vikri telah resmi diperkenalkan oleh kesebelasan Lechia Gdansk Pada Minggu (11/03/2018) pukul 19:00 WIB (atau pukul 13:00 waktu Polandia) tim yang bermain di divisi utama Polandia, Ekstralaksa. Bintang timnas U19 itu akan mulai bermain pada bulan Juli 2018.

Egy mendapatkan kontrak selama tiga musim terhitung mulai Juni 2018 sampai 2021. Dalam beberapa bulan terakhir, Egy sempat diusulkan akan bergabung dengan beberapa kesebelasan besar Eropa lainnya seperti Legia Warsawa, hingga Saint-Etienne klub asal Perancis. Alasan Egy lebih memilih klub Lechia Gdansk tak lain karena adanya jaminan bermain di tim utama. Hal lain yang menjadi pertimbangannya adalah karena banyaknya Masjid di negara tersebut yang memudahkannya menjalankan kewajiban agamanya.

Banyak yang menilai transfer Egy Maulana Vikri ke Lechia Gdansk hanya sebagai strategi pemasaran klub tersebut yang kini pamornya sedang turun dan menghuni papan bawah kompetisi Ekstralaksa. Hal ini bisa disinyalir dari kondisi keuangan Lechia yang mengalami kesulitan dana. Lechia sendiri saat ini diambang jurang degradasi karena menempati posisi ke 14 dari 16 tim yang berkompetisi di ekstralaksa.

Egy Maulana bisa saja menghabiskan tahun pertamanya di Lechia Gdansk main bersama tim pelapis, dan hal itu bukan sesuatu yang harus

dikhawatirkan. Semuanya ada tahapan dan biarkan pelatih Piotr Stokowiec menilai kemampuan Egy Maulana. Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian penggemar sepak bola di Indonesia menginginkan sesuatu yang instan. Sebagian suporter pasti menginginkan Egy Maulana bisa bermain untuk Lechia Gdansk setiap pekan atau bahkan mengharapkan membawa klub tersebut menjadi juara Liga Polandia.

Namun, kita perlu mengingat juga kalau Egy Maulana belum pernah merasakan bermain di kompetisi penuh bersama klub. Dia belum pernah merasakan bekerja keras menjalani latihan dan pertandingan satu musim penuh. Lechia Gdansk merupakan klub profesional pertama Egy Maulana, dan akan menjadi tidak adil jika dia mendapat beban yang berlebihan.

Masalah klasik yang selalu dirasakan pesepakbola Indonesia yang berkarier di luar negeri selama ini adalah *homesick*. Terlebih Polandia bukanlah negara yang dekat dengan Indonesia serta memiliki kultur budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia.

Bukan tidak mungkin bila Egy berhasil menembus tim utama Lechia dan membuktikan kemampuannya di kompetisi Eropa akan banyak pula pemain berbakat asal Indonesia yang akan dilirik oleh para pencari bakat tim-tim Eropa. Egy bisa menjadi salah satu percontohan untuk para pencari bakat klub-klub Eropa.****

SOP KAKI KAMBING BETAWI

Bagi penggemar Sop Kaki Kambing Tanah Abang Jakarta pasti suka pakai susu. Tapi jangan banyak-banyak dan jangan terlalu sering karena ada mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia, bahwa memakan masakan atau makanan berbahan daging kambing dapat meningkatkan tekanan darah Anda. Jadi jika Anda memiliki penyakit darah tinggi harus waspada dalam mengonsumsi daging kambing ini. Berikut resep Sop Kaki Kambing Betawi dengan menggunakan susu:

BAHAN :

- 1 buah kaki kambing
- 5 sdm susu bubuk atau lebih enak dan berkhasiat pakai Susu Kambing Etawa
- 1500 cc air

BUMBU :

- 1/4 sdt pala bubuk
- 5 cm kayu manis
- 5 butir bawang merah, haluskan
- 3 siung bawang putih, haluskan
- 3 cm jahe, haluskan
- 5 butir kapulaga

- 3 butir cengkeh
- 1/4 sdt merica bubuk
- Garam secukupnya
- Gula merah sedikit

CARA MEMBUAT SOP KAKI KAMBING KUAH SUSU:

Bersihkan kaki kambing, potong-potong sesuai selera. Masukkan ke dalam panci, beri air, rebus sampai empuk. Angkat, sisihkan, air untuk kaldu.

Masukkan bumbu halus (atau tumis dulu) ke dalam kaldu, masak sampai mendidih. Masukkan susu bubuk ke dalam kuah, masak sampai matang.

Ambil mangkuk, beri potongan kaki kambing, siram dengan kuah. Beri taburan bawang merah goreng, irisan jeruk nipis dan tomat. Sajikan dengan emping goreng dan acar mentimun.

SELAMAT MENCOBA....

**SELAMAT DATANG DI
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**



**MAYOR JENDERAL TNI DONI MONARDO
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Hari Perempuan mengingatkan kita
untuk tidak melupakan peran mereka



8 Maret 2018

Hari Perempuan Internasional